

Pemulihan Sosial dan Pendidikan Korban Banjir Hidrometeorologi pada Wilayah Terisolasi di Aceh Tamiang

Jamaluddin Jamaluddin^{1*}, Intan Munirah²

¹Universitas Teknologi Nusantara

²Universitas Syiah Kuala

Email: jamaluddin.capt@gmail.com

Received: 05-08-2026 Revised : 15-08-2026 Accepted : 20-08-2026 Published : 26-08-2026

Abstrak

Banjir hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang menimbulkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pendidikan anak, terutama pada lokasi pengungsian yang sulit dijangkau. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi belum meratanya distribusi bantuan pangan serta terbatasnya perlengkapan belajar bagi anak yang mengalami terhentinya proses pembelajaran. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak pada lokasi yang sulit dijangkau serta membantu keberlanjutan pendidikan anak melalui penyediaan perlengkapan belajar dan kegiatan edukatif. Kegiatan dilaksanakan pada 25–29 Mei 2026 melalui tahapan identifikasi lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, observasi kebutuhan, penetapan penerima manfaat, distribusi bantuan, penyuluhan edukatif, dan evaluasi kegiatan. Sasaran program terdiri atas 50 keluarga terdampak yang berada di lokasi pengungsian sulit dijangkau, memiliki keterbatasan akses bantuan pangan, serta belum atau belum optimal memperoleh bantuan, dan 30 anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang mengalami terhentinya pembelajaran serta membutuhkan perlengkapan untuk mengikuti sekolah darurat. Intervensi dilakukan melalui penyaluran 50 paket kebutuhan pokok kepada 50 keluarga, 30 paket perlengkapan pendidikan berupa tas, buku, dan alat tulis kepada 30 anak, serta penyuluhan edukatif. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh bantuan berhasil disalurkan sesuai target program dengan dukungan transportasi dari Pemerintah Aceh. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana perlu mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlanjutan pendidikan. Implikasi kegiatan menekankan perlunya perluasan jangkauan bantuan, pendataan penerima secara terintegrasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga kemanusiaan.

Kata kunci: korban banjir, bencana hidrometeorologi, bantuan kemanusiaan, pemulihan pascabencana, pendidikan darurat

Abstract

The hydrometeorological flood in Aceh Tamiang Regency affected the fulfillment of basic needs and the continuity of children's education, particularly in evacuation areas that were difficult to access. The main problems identified were the uneven distribution of food assistance and the limited availability of learning supplies for children whose education had been disrupted. This community service program aimed to support the fulfillment of food needs for affected communities in hard-to-reach areas and to sustain children's education through the provision

of learning supplies and educational activities. The program was implemented from 25 to 29 May 2026 through location identification, coordination with relevant stakeholders, needs assessment, beneficiary selection, aid distribution, educational outreach, and evaluation. The beneficiaries consisted of 50 affected families living in difficult-to-reach evacuation areas with limited access to food assistance and 30 primary to junior secondary school children whose learning activities had been interrupted and who required supplies to participate in emergency schooling. The interventions included the distribution of 50 basic-needs packages to 50 families, 30 educational supply packages consisting of school bags, books, and stationery to 30 children, and educational outreach activities. The results showed that all planned assistance was successfully distributed, supported by transportation assistance from the Aceh Government. The program indicates that post-disaster recovery should integrate basic-needs support with educational continuity. Its practical implications highlight the need to expand aid coverage, establish integrated beneficiary data, and strengthen sustained collaboration among government, universities, and humanitarian organizations.

Keywords: *Flood victims, hydrometeorological disaster, humanitarian assistance, post-disaster recovery, emergency education*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi, termasuk bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Bencana hidrometeorologi cenderung terjadi secara berulang dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama pada wilayah yang memiliki kerentanan lingkungan, keterbatasan infrastruktur, serta kapasitas kesiapsiagaan yang belum memadai (Bencana, 2024). Banjir sebagai salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, seperti curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, tetapi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan, tata guna lahan, kapasitas daerah aliran sungai, serta aktivitas manusia. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023)

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap banjir dan banjir bandang. Karakteristik wilayah berupa kawasan pegunungan, hutan, sungai-sungai besar, wilayah pesisir, serta curah hujan yang relatif tinggi menyebabkan sejumlah kabupaten dan kota memiliki risiko banjir yang cukup besar. Kerentanan tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan fungsi kawasan hutan, berkurangnya daerah resapan air, sedimentasi dan penyempitan sungai, pembangunan permukiman pada kawasan rawan banjir, serta keterbatasan sistem drainase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak hanya membutuhkan respons pada saat bencana terjadi, tetapi juga memerlukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan peningkatan kapasitas masyarakat. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023).

Data kebencanaan pada Mei 2026 menunjukkan bahwa Provinsi Aceh masih menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi secara berulang. Pada periode tersebut tercatat 14 kejadian bencana yang meliputi banjir, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan keberlangsungan pendidikan masyarakat. Kerusakan jalan dan

jembatan pada sejumlah wilayah terdampak juga menyebabkan akses menuju lokasi pengungsian menjadi terbatas, sehingga menghambat proses evakuasi maupun distribusi bantuan kemanusiaan. (BNPB, 2025).

Kondisi tersebut turut dialami oleh masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satu persoalan utama dalam proses pemulihan adalah belum meratanya distribusi kebutuhan dasar, khususnya bahan pangan, kepada masyarakat yang berada pada lokasi yang jauh dari jalur utama dan sulit dijangkau. Keterbatasan akses menyebabkan sebagian masyarakat menghadapi kesulitan dalam memperoleh makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Situasi tersebut menjadi semakin penting bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian penting dalam penanganan bencana sebagaimana dimuat dalam Pasal 26, 48 dan 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, keberlanjutan pendidikan anak menjadi persoalan penting dalam proses pemulihan pascabencana. Banjir yang terjadi menjelang akhir tahun 2025 mengakibatkan berbagai fasilitas pendidikan tidak dapat digunakan. Data Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 2.756 sekolah terdampak dan tidak dapat difungsikan sehingga aktivitas pembelajaran anak, khususnya yang masih berada pada fase wajib belajar, mengalami gangguan. Pada lokasi sasaran kegiatan, proses pembelajaran anak telah terputus selama kurang lebih empat bulan. Di sisi lain, penyelenggaraan sekolah darurat telah mulai didukung oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi sebagian anak masih menghadapi keterbatasan perlengkapan belajar untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Bencana juga dapat menimbulkan dampak psikologis berupa rasa takut, kecemasan, tekanan emosional, dan trauma akibat kehilangan tempat tinggal, harta benda, sumber penghidupan, maupun ketidakpastian terhadap proses pemulihan. Oleh karena itu, penanganan pascabencana tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran bantuan logistik, tetapi juga perlu disertai dukungan psikososial dan kegiatan edukatif yang membantu masyarakat, khususnya anak-anak, untuk kembali menjalankan aktivitas sosial dan pendidikan. Penanganan bencana pada prinsipnya mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, distribusi bantuan, perlindungan kelompok rentan, pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar, serta koordinasi antarlembaga. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kecepatan respons, ketepatan sasaran bantuan, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Meskipun pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, organisasi sosial, dan berbagai unsur masyarakat telah melakukan upaya tanggap darurat dan pemulihan, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat terdampak dengan jangkauan bantuan yang tersedia, khususnya pada wilayah yang sulit dijangkau di Aceh Tamiang. Kesenjangan tersebut terlihat pada dua aspek utama, yaitu belum meratanya distribusi bantuan pangan kepada masyarakat terdampak dan masih terbatasnya dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah agar proses pemulihan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan aktivitas pendidikan anak pascabencana.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki posisi strategis untuk berkontribusi dalam proses pemulihan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

khususnya pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Keterlibatan perguruan tinggi dalam penanganan bencana dapat diwujudkan tidak hanya melalui pemberian bantuan langsung, tetapi juga melalui kegiatan edukasi, pendampingan psikososial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta dukungan terhadap pemulihan pendidikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penanganan bencana juga sejalan dengan paradigma pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kapasitas, dan potensi untuk membangun ketangguhan. Oleh karena itu, pemberian bantuan kebutuhan dasar perlu diintegrasikan dengan kegiatan edukatif agar memberikan manfaat yang lebih luas dalam proses pemulihan. Dalam kegiatan ini, intervensi difokuskan pada masyarakat yang berada di lokasi sulit dijangkau serta anak-anak terdampak yang membutuhkan dukungan untuk kembali mengikuti aktivitas pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak banjir pada lokasi yang sulit dijangkau di Aceh Tamiang; dan (2) membantu keberlanjutan pendidikan anak terdampak banjir melalui penyediaan perlengkapan belajar dan kegiatan edukatif.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tamiang pada 25–29 Mei 2026 atau selama lima hari. Kabupaten Aceh Tamiang dipilih sebagai lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan besarnya dampak banjir hidrometeorologi, adanya wilayah pengungsian yang relatif sulit dijangkau, keterbatasan distribusi bantuan kebutuhan dasar, serta terganggunya aktivitas pendidikan anak akibat bencana. Kegiatan dilaksanakan oleh dosen Program Studi Manajemen Universitas Teknologi Nusantara dan dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala dengan dukungan Pemerintah Aceh serta unsur penanganan bencana di lokasi kegiatan.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi lokasi, koordinasi dengan pihak terkait, observasi kebutuhan masyarakat, penetapan penerima manfaat, distribusi bantuan, penyuluhan edukatif, dan evaluasi kegiatan.

Tahap pertama berupa identifikasi lokasi dilakukan untuk menentukan titik kegiatan yang sesuai dengan tujuan program. Penentuan lokasi mempertimbangkan kondisi wilayah terdampak, tingkat kesulitan akses menuju lokasi pengungsian, keterjangkauan distribusi bantuan, serta kondisi pendidikan anak pascabencana. Informasi awal mengenai kondisi masyarakat dan kebutuhan di lokasi diperoleh melalui koordinasi dengan Tim Penanganan Bencana Aceh, Badan Reintegrasi Aceh, Pemerintah Aceh, serta unsur terkait yang terlibat dalam penanganan bencana.

Tahap kedua dilakukan melalui koordinasi dengan mitra dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lapangan, akses menuju lokasi, kebutuhan masyarakat, serta kelompok yang membutuhkan bantuan. Pemerintah Aceh turut memberikan

dukungan berupa fasilitas transportasi untuk mobilisasi tim dan pengangkutan paket bantuan menuju lokasi terdampak. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan kegiatan pengabdian tidak tumpang tindih dengan distribusi bantuan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga kemanusiaan lainnya.

Tahap ketiga adalah observasi kebutuhan masyarakat pada titik pengungsian yang telah ditentukan. Observasi dilakukan secara langsung dengan memperhatikan kondisi masyarakat terdampak, ketersediaan bantuan kebutuhan dasar, akses terhadap bantuan pangan, serta kondisi pendidikan anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa kebutuhan yang menjadi prioritas kegiatan meliputi pemenuhan sebagian kebutuhan pangan bagi keluarga terdampak dan penyediaan perlengkapan belajar bagi anak-anak yang mengalami terhentinya proses pendidikan akibat banjir.

Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi, sasaran kegiatan terdiri atas 50 keluarga terdampak dan 30 anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Penerima bantuan pangan ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu keluarga yang terdampak banjir, berada pada lokasi pengungsian yang sulit dijangkau, mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan pangan, serta belum memperoleh atau belum optimal memperoleh bantuan pada saat proses identifikasi dilakukan. Penetapan berdasarkan kriteria tersebut dimaksudkan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan lebih mendesak dan belum terjangkau secara optimal oleh distribusi bantuan sebelumnya.

Sementara itu, penerima bantuan pendidikan ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang terdampak banjir, berada di lokasi pengungsian, mengalami terhentinya proses pembelajaran, dan membutuhkan perlengkapan untuk mengikuti sekolah darurat. Penetapan kriteria tersebut dilakukan agar bantuan pendidikan diberikan kepada anak-anak yang secara langsung mengalami gangguan keberlanjutan pembelajaran akibat bencana dan membutuhkan dukungan perlengkapan belajar untuk dapat kembali mengikuti kegiatan pendidikan. Pemilihan penerima manfaat juga mempertimbangkan keberadaan program sekolah darurat yang sedang dipersiapkan di wilayah terdampak.

Intervensi pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan melalui penyaluran 50 paket sembako kepada 50 keluarga penerima manfaat. Distribusi dilakukan secara langsung pada titik pengungsian yang telah ditetapkan dengan melibatkan tim pengabdian dan unsur penanganan bencana di lokasi. Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.

Pada aspek pendidikan, kegiatan dilakukan melalui penyaluran 30 paket perlengkapan sekolah yang terdiri atas tas, buku, dan alat tulis kepada 30 anak terdampak banjir. Sebelum distribusi perlengkapan belajar, tim juga melaksanakan penyuluhan edukatif yang diarahkan untuk membangun kembali motivasi dan semangat belajar anak setelah mengalami terhentinya aktivitas pendidikan akibat bencana. Pemberian perlengkapan belajar tersebut sekaligus dimaksudkan untuk mendukung kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui sekolah darurat.

Metode Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara terpisah dari tahapan pelaksanaan untuk mengetahui ketercapaian program berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi difokuskan pada

ketepatan penerima manfaat, keterjangkauan distribusi bantuan, kesesuaian jumlah bantuan dengan sasaran, serta keterlaksanaan kegiatan penyuluhan edukatif.

Instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi meliputi lembar observasi lapangan, daftar penerima manfaat, catatan distribusi bantuan, dan dokumentasi kegiatan. Lembar observasi digunakan untuk mencatat kondisi lokasi pengungsian, keterjangkauan wilayah, akses masyarakat terhadap bantuan pangan, serta kondisi pendidikan anak. Daftar penerima manfaat digunakan untuk memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan. Catatan distribusi digunakan untuk mencatat jumlah dan jenis bantuan yang disalurkan, sedangkan dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan distribusi bantuan dan penyuluhan edukatif.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan ketercapaian keluaran (*output*) program, yaitu: (1) tersalurkannya 50 paket sembako kepada 50 keluarga terdampak yang memenuhi kriteria pada lokasi pengungsian yang sulit dijangkau; (2) tersalurkannya 30 paket perlengkapan sekolah kepada 30 anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang memenuhi kriteria penerima manfaat; (3) terlaksananya kegiatan penyuluhan edukatif kepada anak penerima manfaat; dan (4) terlaksananya distribusi bantuan pada lokasi sasaran yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan.

Keberhasilan program dievaluasi dengan membandingkan target penerima manfaat dan jumlah bantuan yang telah direncanakan dengan realisasi kegiatan selama 25–29 Mei 2026. Evaluasi digunakan untuk menggambarkan ketercapaian kegiatan pengabdian pada dua aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pada lokasi yang sulit dijangkau serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak terdampak banjir di Aceh Tamiang.

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemulihan sosial dan pendidikan korban banjir hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang dilaksanakan selama lima hari, yaitu pada 25–29 Mei 2026. Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan observasi langsung pada lokasi sasaran untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat terdampak, keterjangkauan distribusi bantuan, kebutuhan pangan, serta kondisi pendidikan anak di lokasi pengungsian.

Hasil observasi menunjukkan bahwa distribusi bantuan kebutuhan pokok pada beberapa lokasi belum sepenuhnya merata, terutama pada titik pengungsian yang relatif sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian keluarga masih mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan pangan. Selain kebutuhan pangan, ditemukan pula kebutuhan perlengkapan belajar bagi anak-anak terdampak banjir yang mengalami terhentinya proses pembelajaran dan membutuhkan dukungan untuk mengikuti kegiatan sekolah darurat. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian difokuskan pada dua bentuk intervensi, yaitu penyaluran bantuan kebutuhan pokok kepada keluarga terdampak dan dukungan pendidikan bagi anak melalui pemberian perlengkapan sekolah serta penyuluhan edukatif. Data kondisi penduduk terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi konteks pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Korban Banjir Aceh Tamiang

No	Kondisi Penduduk	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	Jumlah penduduk sebelum banjir (BPS 2025)	316.534	100,00
2	Penduduk terdampak banjir	298.925	94,44
3	Korban meninggal	57	0,02
4	Penduduk mengungsi	262.087	82,80
5	Penduduk terdampak tetapi tidak mengungsi	36.838	11,64
6	Penduduk yang tidak terdampak	17.609	5,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tamiang, Pemerintah Aceh (2025-2026)

Berdasarkan Tabel 1, sebanyak 298.925 jiwa atau 94,44% dari total 316.534 penduduk tercatat terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, sebanyak 262.087 jiwa atau 82,80% dari total penduduk berada dalam kondisi mengungsi. Besarnya jumlah masyarakat terdampak dan pengungsi memperlihatkan luasnya dampak bencana serta menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kabupaten Aceh Tamiang. Namun, data populasi tersebut digunakan sebagai gambaran kondisi wilayah dan tidak digunakan sebagai denominator untuk menghitung persentase keberhasilan program, karena sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Pada aspek pendidikan, data Pemerintah Aceh mencatat sekitar 3.000 anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang berada di lokasi pengungsian dan mengalami terhentinya proses pembelajaran. (Pemerintah Aceh, 2025-2026). Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan terhadap dukungan pendidikan, khususnya perlengkapan belajar untuk menunjang pelaksanaan sekolah darurat.

Berdasarkan hasil identifikasi dan observasi lapangan, sasaran bantuan pangan ditetapkan sebanyak 50 keluarga terdampak. Keluarga penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria, yaitu terdampak banjir, berada pada lokasi pengungsian yang sulit dijangkau, mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan pangan, serta belum atau belum optimal memperoleh bantuan pada saat proses identifikasi dilakukan. Selama pelaksanaan kegiatan, 50 paket sembako berhasil disalurkan kepada 50 keluarga yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, realisasi distribusi bantuan pangan mencapai 50 dari 50 paket atau 100% dari target program.

Pada aspek pendidikan, sasaran kegiatan ditetapkan sebanyak 30 anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang terdampak banjir, berada di lokasi pengungsian, mengalami terhentinya proses pembelajaran, serta membutuhkan perlengkapan untuk mengikuti sekolah darurat. Sebanyak 30 paket perlengkapan pendidikan, yang terdiri atas tas, buku, dan alat tulis, berhasil disalurkan kepada 30 anak penerima manfaat. Dengan demikian, realisasi bantuan pendidikan mencapai 30 dari 30 paket atau 100% dari target program.

Apabila dibandingkan dengan data sekitar 3.000 anak yang mengalami gangguan proses pendidikan, 30 anak penerima manfaat setara dengan sekitar 1% dari populasi anak terdampak tersebut. Persentase ini hanya menggambarkan cakupan intervensi terhadap populasi anak terdampak, bukan tingkat keberhasilan program. Keberhasilan kegiatan tetap dinilai

berdasarkan ketercapaian target yang telah ditetapkan, yaitu tersalurkannya 30 paket perlengkapan pendidikan kepada 30 anak yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Selain pemberian perlengkapan sekolah, tim pengabdian juga melaksanakan penyuluhan edukatif kepada anak-anak penerima manfaat. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan dukungan psikososial sederhana, membangun kembali motivasi, serta menumbuhkan semangat belajar setelah aktivitas pendidikan mereka terhenti akibat bencana. Penyuluhan dilaksanakan sebelum penyerahan perlengkapan sekolah dan menjadi bagian yang terintegrasi dengan upaya mendukung keberlanjutan pendidikan melalui kegiatan sekolah darurat. Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan program pengabdian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Program Pemulihan Sosial dan Pendidikan Korban Banjir Hidrometeorologi di Aceh Tamiang

Jenis Kegiatan	Sasaran	Jumlah Bantuan/ Kegiatan	Jumlah Penerima	Lokasi	Capaian
Distribusi bantuan kebutuhan pokok	Keluarga terdampak banjir yang berada pada lokasi pengungsian sulit dijangkau, mengalami keterbatasan akses bantuan pangan, serta belum atau belum optimal memperoleh bantuan	50 paket sembako	50 keluarga	Lokasi pengungsian terdampak banjir di Aceh Tamiang yang sulit dijangkau	50 dari 50 paket tersalurkan (100% target program)
Distribusi perlengkapan pendidikan	Anak usia SD sampai SMP yang terdampak banjir, berada di pengungsian, mengalami terhentinya pembelajaran, dan membutuhkan	30 paket berupa tas, buku, dan alat tulis	30 anak	Lokasi pengungsian/sekolah darurat di Aceh Tamiang	30 dari 30 paket tersalurkan (100% target program)

	perlengkapan untuk mengikuti sekolah				
Penyuluhan edukatif	Anak penerima manfaat bantuan pendidikan	1 rangkaian kegiatan penyuluhan edukatif	30 anak	Lokasi kegiatan pengabdian di Aceh Tamiang	Terlaksana kepada seluruh sasaran program

Sumber: Data kegiatan pengabdian, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh bantuan yang direncanakan dapat disalurkan sesuai dengan target program. Pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan, sebanyak 50 paket sembako diberikan kepada 50 keluarga terdampak, sedangkan pada aspek pendidikan sebanyak 30 paket perlengkapan sekolah diberikan kepada 30 anak terdampak. Penyuluhan edukatif juga terlaksana kepada anak-anak penerima manfaat. Dengan demikian, berdasarkan indikator keluaran (*output*) yang telah ditetapkan, program mencapai target distribusi bantuan yang direncanakan. Meskipun demikian, jumlah penerima manfaat masih terbatas dibandingkan dengan luasnya populasi terdampak sehingga diperlukan keterlibatan berkelanjutan dari pemerintah, perguruan tinggi, lembaga kemanusiaan, dan berbagai unsur masyarakat dalam mendukung proses pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Pembahasan

Kegiatan Banjir hidrometeorologi yang terjadi di Aceh memberikan dampak multidimensional terhadap masyarakat, meliputi aspek lingkungan, fisik, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum, banjir dapat dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, perubahan kondisi lingkungan, gangguan aliran sungai, maupun faktor lain yang menyebabkan kapasitas sistem drainase dan sungai tidak mampu menampung debit air. (Asep Sumaryana, 2018). Dalam perspektif hidrologi dan manajemen bencana, banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pemicu, lokasi, dan dinamika alirannya. (Asdak, 2010). Banjir hidrometeorologi berkaitan dengan dinamika atmosfer dan siklus hidrologi, terutama ketika intensitas curah hujan melebihi kapasitas infiltrasi tanah dan daya tampung saluran air. (Asdak, 2010). Intensitas hujan yang tinggi dalam durasi relatif pendek juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kejadian tersebut. (Aldrian, 2003).

Dampak bencana tersebut terlihat pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur, termasuk lahan pertanian, jaringan jalan, dan jembatan. (Kodoatie, 2002). Kerusakan akses transportasi menjadi persoalan penting dalam konteks kegiatan pengabdian di Kabupaten Aceh Tamiang karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan bantuan kemanusiaan menjangkau lokasi pengungsian. Oleh karena itu, pembahasan kegiatan ini difokuskan pada tiga hasil utama, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pada lokasi yang sulit dijangkau, dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak, serta kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana.

Ketepatan Pemenuhan Kebutuhan Pangan pada Lokasi Sulit Dijangkau

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu prioritas selama masa pengungsian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Kebutuhan fisiologis, termasuk makanan dan air, merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya. Konsep tersebut sejalan dengan teori *Human Needs* yang menempatkan kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling mendasar. (L, 2022).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa distribusi bantuan pada beberapa titik pengungsian di Aceh Tamiang belum sepenuhnya merata, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses. Kondisi tersebut menjadi dasar tim pengabdian dalam menetapkan sasaran bantuan pangan. Penerima manfaat ditentukan berdasarkan kriteria, yaitu keluarga terdampak banjir yang berada pada lokasi pengungsian sulit dijangkau, mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan pangan, serta belum memperoleh atau belum optimal memperoleh bantuan pada saat identifikasi dilakukan.

Berdasarkan kriteria tersebut, kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui kolaborasi dosen Universitas Teknologi Nusantara dan Universitas Syiah Kuala berhasil menyalurkan 50 paket sembako kepada 50 keluarga terdampak. Seluruh bantuan yang direncanakan dapat disalurkan kepada sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian bantuan pangan mencapai 100% berdasarkan target internal program.

Penentuan penerima berdasarkan kondisi kebutuhan di lapangan menjadi penting karena distribusi bantuan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan jumlah bantuan yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan program menjangkau masyarakat yang belum memperoleh bantuan secara optimal. Dalam konteks manajemen bencana, pendekatan kolaboratif dan pengelolaan distribusi bantuan merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara lebih tepat sasaran. (Asep Sumaryana, 2018).

Kegiatan ini menunjukkan bahwa intervensi berskala terbatas dapat memberikan manfaat apabila sasaran ditetapkan berdasarkan kondisi konkret masyarakat. Meskipun 50 keluarga penerima manfaat belum mewakili keseluruhan masyarakat terdampak di Aceh Tamiang, penggunaan kriteria keterjangkauan dan kondisi penerimaan bantuan sebelumnya memungkinkan sumber daya yang tersedia diarahkan kepada keluarga yang memiliki kebutuhan lebih mendesak.



Gambar 1. Penyerahan paket sembako kepada korban banjir di wilayah Aceh Tamiang.

Dukungan terhadap Keberlanjutan Pendidikan Anak

Selain kebutuhan pangan, pemulihan pendidikan menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi masyarakat pascabencana. Banjir menyebabkan sebagian fasilitas pendidikan tidak dapat digunakan dan mengakibatkan terhentinya aktivitas belajar anak. Dalam kegiatan ini, dukungan pendidikan difokuskan kepada anak-anak yang berada pada fase wajib belajar dan membutuhkan perlengkapan untuk mengikuti kegiatan sekolah darurat.

Penerima manfaat pendidikan ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama yang terdampak banjir, berada di lokasi pengungsian, mengalami terhentinya proses pembelajaran, dan membutuhkan perlengkapan untuk mengikuti sekolah darurat. Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 30 anak ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Program menyediakan 30 paket perlengkapan sekolah berupa tas, buku, dan alat tulis. Seluruh paket berhasil disalurkan kepada 30 anak penerima manfaat. Sebelum bantuan diberikan, tim pengabdian juga melaksanakan penyuluhan edukatif yang diarahkan untuk membangun kembali motivasi dan semangat belajar anak setelah aktivitas pendidikan mereka terhenti akibat bencana.

Pemberian perlengkapan belajar tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bantuan material, tetapi juga sebagai dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Keberadaan program sekolah darurat membutuhkan dukungan perlengkapan dasar agar anak dapat kembali terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, bantuan perlengkapan sekolah dan penyuluhan edukatif menjadi bagian yang saling melengkapi dalam mendukung proses pemulihan pendidikan.



Gambar 2. Penyuluhan pentingnya menumbuhkan semangat belajar terhadap anak korban bencana di Aceh Tamiang.

Penyerahan paket perlengkapan sekolah dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat, sedangkan distribusi kepada anak-anak lainnya dilakukan oleh tim

pengabdian dengan dukungan satuan tugas tanggap bencana di lokasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga diselenggarakan dengan keberadaan sekolah darurat yang membutuhkan dukungan perlengkapan belajar bagi anak.



Gambar 3. Penyerahan bantuan perlengkapan sekolah secara simbolis.

Kajian mengenai pemulihan pascabencana menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan pelayanan publik. Pendekatan *Build Back Better* menempatkan pemulihan sebagai proses yang tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko di masa mendatang. (Glen Fernandez, 2019). Dalam konteks kegiatan ini, pemulihan pendidikan melalui penyediaan perlengkapan belajar merupakan salah satu intervensi awal untuk membantu anak kembali mengikuti aktivitas pendidikan.

Data kegiatan menunjukkan bahwa bantuan pendidikan menjangkau 30 anak dari sekitar 3.000 anak terdampak. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas program masih terbatas dibandingkan dengan luasnya kebutuhan pendidikan pascabencana. Oleh karena itu, capaian 30 paket kepada 30 anak lebih tepat dipahami sebagai ketercapaian target kegiatan, bukan sebagai representasi pemulihan pendidikan seluruh anak terdampak. Kondisi ini sekaligus menunjukkan perlunya keterlibatan lebih luas dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemanusiaan, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan pemulihan pendidikan.

Kolaborasi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Aceh Tamiang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana. Perguruan tinggi melalui dosen Universitas Teknologi Nusantara dan Universitas Syiah Kuala berkontribusi dalam identifikasi kebutuhan, observasi lapangan, penetapan sasaran penerima manfaat, distribusi bantuan, dan pelaksanaan penyuluhan edukatif. Sementara itu, Pemerintah

Aceh memberikan dukungan operasional berupa dua unit armada yang digunakan untuk mobilisasi tim dan membawa paket bantuan menuju lokasi terdampak.

Dukungan transportasi tersebut memiliki peran penting karena salah satu kendala utama dalam kegiatan adalah akses menuju lokasi pengungsian yang relatif sulit dijangkau. Dengan adanya dukungan pemerintah, tim dapat membawa bantuan pangan dan perlengkapan pendidikan menuju lokasi sasaran. Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya sinergi antara unsur pemerintah dan perguruan tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat terdampak.

Kolaborasi ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelesaian persoalan publik. (Sedarmayanti, 2012). Penanggulangan bencana merupakan kepentingan publik yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, relawan, serta masyarakat. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi tidak menggantikan peran pemerintah, tetapi melengkapi program pemulihan melalui kegiatan pengabdian yang diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan kebutuhan tertentu.



Gambar 4. Kegiatan tanggap bencana yang didukung oleh kendaraan operasional dari Pemerintah Aceh.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana dapat dikembangkan melalui pola kolaborasi yang lebih terstruktur. Pemerintah memiliki kapasitas koordinasi, informasi wilayah, dan dukungan operasional, sedangkan perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui identifikasi kebutuhan, kegiatan edukatif, pendampingan masyarakat, dan penerapan keilmuan. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan ketepatan intervensi sekaligus memperluas jangkauan program pemulihan.

Manajemen Pemulihan Pascabencana

Dalam manajemen bencana modern, proses penanganan tidak berakhir ketika kondisi darurat selesai atau air banjir telah surut. Fase pemulihan (*recovery*) merupakan bagian penting dalam siklus manajemen bencana untuk mengembalikan fungsi kehidupan masyarakat. Fase ini mencakup dua tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu *rehabilitation* dan *reconstruction*. *Rehabilitation* merupakan proses pemulihan jangka pendek hingga menengah untuk mengembalikan pelayanan publik dan fungsi kehidupan masyarakat, sedangkan *reconstruction*

merupakan pembangunan kembali sarana, prasarana, dan kelembagaan secara lebih permanen dengan menerapkan prinsip *Build Back Better and Safer*. (Coppola, 2015).

Berdasarkan kerangka tersebut, kegiatan pengabdian di Aceh Tamiang dapat ditempatkan terutama pada fase rehabilitasi. Kegiatan tidak diarahkan pada pembangunan kembali infrastruktur secara permanen, tetapi pada pemulihan fungsi dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Bentuk implementasinya berupa distribusi 50 paket sembako kepada 50 keluarga terdampak, pemberian 30 paket perlengkapan sekolah kepada 30 anak, serta pelaksanaan penyuluhan edukatif.

Posisi kegiatan dalam fase rehabilitasi juga terlihat dari orientasinya pada pemulihan pelayanan dan kehidupan masyarakat dalam jangka pendek hingga menengah. Bantuan pangan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar selama masa pemulihan, sedangkan perlengkapan sekolah dan penyuluhan edukatif membantu anak untuk kembali mengikuti kegiatan pendidikan melalui sekolah darurat. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi mendukung pemulihan dua fungsi dasar masyarakat, yaitu keberlangsungan kehidupan keluarga dan pendidikan anak.

Kajian mengenai *Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)* menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara multidisiplin dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat. Kajian terhadap berbagai dokumen PDNA juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan dipengaruhi oleh kualitas identifikasi kebutuhan, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan data mengenai kondisi masyarakat dan dampak bencana. (UNDRR, 2024). Pendekatan tersebut relevan dengan kegiatan ini karena penetapan penerima manfaat dilakukan melalui identifikasi dan observasi kebutuhan sebelum bantuan disalurkan.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa target utama program dapat direalisasikan, yaitu 50 dari 50 paket sembako berhasil disalurkan kepada 50 keluarga sasaran dan 30 dari 30 paket perlengkapan pendidikan berhasil disalurkan kepada 30 anak sasaran, disertai terlaksananya penyuluhan edukatif. Dengan demikian, indikator keluaran (*output*) program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Meskipun demikian, capaian tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Program memiliki cakupan terbatas dibandingkan dengan luasnya populasi terdampak di Aceh Tamiang. Manfaat kegiatan terutama terlihat pada kemampuan program menjangkau kelompok sasaran yang telah diidentifikasi dan menyalurkan seluruh bantuan yang direncanakan. Oleh karena itu, keberlanjutan pemulihan tetap membutuhkan intervensi dalam skala yang lebih luas serta koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, pemulihan pascabencana pada tingkat komunitas tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan pangan dan keberlanjutan pendidikan merupakan bagian penting dari rehabilitasi sosial masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan posisi kegiatan pengabdian ini terhadap literatur sebelumnya, yaitu memberikan contoh implementasi pemulihan pada tingkat komunitas melalui kombinasi bantuan kebutuhan dasar, dukungan pendidikan, dan kolaborasi pemerintah–perguruan tinggi. Pendekatan tersebut melengkapi berbagai kajian yang selama ini

banyak menitikberatkan pada kerangka *Build Back Better, Post-Disaster Needs Assessment*, serta ketahanan infrastruktur. (Glen Fernandez, 2019).

Kesimpulan

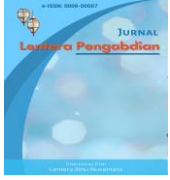
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, program pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang berhasil menjangkau 50 keluarga terdampak melalui penyaluran 50 paket kebutuhan pokok serta 30 anak usia sekolah melalui pemberian 30 paket perlengkapan pendidikan berupa tas, buku, dan alat tulis. Selain bantuan material, kegiatan juga dilengkapi dengan penyuluhan edukatif yang bertujuan menumbuhkan kembali motivasi dan semangat belajar anak setelah proses pembelajaran terhenti akibat bencana. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi manajemen bencana pada tahap rehabilitasi, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pendidikan anak melalui program sekolah darurat yang didukung oleh Human Initiative Foundation. Pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan Pemerintah Aceh, terutama dalam penyediaan sarana transportasi untuk mobilisasi tim dan distribusi bantuan ke lokasi yang sulit dijangkau. Ke depan, diperlukan perluasan jangkauan penerima manfaat, pendataan penerima bantuan secara terintegrasi, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat untuk mendukung proses pemulihan sosial dan pendidikan anak secara lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Khususnya kantor Wilayah Provinsi Aceh dan Aceh Tamiang. Ucapan Terimakasih juga kepada Pemerintah Aceh serta Lembaga terkait yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga pengabdian masyarakat berupa tanggap bencana memberikan edukasi dan bantuan kebutuhan pokok dilengkapi dengan perlengkapan sekolah kerna dukungan pemerintah dan Dosen sebagai agen pelaksana sekaligus volunteer dari kegiatan tanggap bencana tersebut.

Daftar Pustaka

- Aldrian, E. &. (2003). Identification of three dominant rainfall regions within Indonesia and their relationship to sea surface temperature. *International Journal of Climatology*, 23(12), 1435.
- Asdak, C. (2010). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asep Sumaryana, S. B. (2018). Sosialisasi Model Kolaborasi dalam Manajemen Bencana Alam di Kabupaten Pangandaran. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 136.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). *Buku Data Bencana Indonesia 2023, bagian kajian potensi bahaya banjir di Provinsi Aceh*. Aceh: BNPB.
- Bencana, B. N. (2024). *Buku Data Bencana Indonesia*. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
- BNPB. (2025). *dampak banjir dan longsor terhadap permukiman, persawahan, jalur transportasi serta isolasi*. Jakarta: BNPB.

	JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 04 No 03 Juli 2026 E ISSN:2985-6140 https://lenteranusa.id/	
---	---	---

- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management (3rd ed.)*. UK: Elsvier, british library.
- Glen Fernandez, i. a. (2019). Build back better” approach to disaster recovery: Research trends since 2006. *Elsivier*.
- Kodoatie, R. J. (2002). *Banjir: Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- L, R. (2022). *Management, 13th ed*. Boston: Cengage Learning.
- Pemerintah Aceh, B. A. (2025-2026). *Rekapitulasi Korban Tanggap Darurat Bencana*. Aceh: Setda.
- Sedarmayanti, C. I.–1. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*,. Bandung: Mandar Maju.
- UNDRR, U. d.-D. (2024). *Review of the Environment Sector in Hydrometeorological Post-Disaster Needs Assessments (PDNAs)* . Geneva: UNDRR,.